



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Hubungan Internasional Program Sarjana**

*Terakreditasi UNGGUL*  
*SK BAN-PT No. 2579/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022*

***Youth-Led Movement Thailand* Terkait**  
**Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Thailand Pada Masa Kepemimpinan**  
**Prayut Chan-ocha**

Skripsi

Oleh  
Ciecillia Michelle Savira  
6091901068

Bandung  
2023



**Universitas Katolik Parahyangan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi Hubungan Internasional Program Sarjana**

*Terakreditasi UNGGUL  
SK BAN-PT No. 2579/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022*

***Youth-Led Movement Thailand* Terkait  
Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Thailand Pada Masa Kepemimpinan  
Prayut Chan-ocha**

Skripsi

Oleh  
Ciecillia Michelle Savira  
6091901068

Pembimbing  
Sylvia Yazid, S.IP., MPPM., Ph.D.

Bandung  
2023

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Jurusan Hubungan Internasional**  
**Program Studi Hubungan Internasional Program Sarjana**




**Tanda Pengesahan Skripsi**


Nama : Ciecillia Michelle Savira  
Nomor Pokok : 6091901068  
Judul : *Youth-Led Movement* Thailand Terkait Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Thailand Pada Masa Kepemimpinan Prayut Chan-ocha

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana  
Pada Rabu, 28 Juni 2023  
Dan dinyatakan **LULUS**

**Tim Penguji**  
**Ketua sidang merangkap anggota**  
Yulia Indrawati Sari, Ph.D.

  
: \_\_\_\_\_

**Sekretaris**  
Sylvia Yazid, MPPM., Ph.D.

  
: \_\_\_\_\_

**Anggota**  
Mireille Marcia Karman, S.Sos., M.Litt.

  
: \_\_\_\_\_

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ciecillia Michelle Savira

NPM : 6091901068

Program Studi : Sarjana Hubungan Internasional

Judul Skripsi : *Youth-Led Movement* Thailand Terkait  
Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Thailand Pada Masa  
Kepemimpinan Prayut Chan-ocha

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 19 Juni 2023

Penulis,

The image shows a handwritten signature in black ink that reads "Cecille". To the right of the signature is a rectangular postage stamp with a pink and white border. The stamp features the Garuda Pancasila emblem at the top, the word "METRAI" in the middle, and the number "10000" at the bottom.

Ciecillia Michelle Savira

## ABSTRAK

Nama : Ciecillia Michelle Savira

NPM : 6091901068

Judul Skripsi : *Youth-Led Movement* Thailand Terkait Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Thailand Pada Masa Kepemimpinan Prayut Chan-ocha

---

Saat ini, pemenuhan HAM masih belum dijalankan dengan baik di Thailand dikarenakan berbagai kebijakan yang diterapkan oleh perdana menteri mereka, Prayut Chan-ocha. Prayut yang memegang kekuasaan di Thailand sejak tahun 2014 hingga 2023 ini banyak menetapkan kebijakan yang melanggar HAM masyarakat sehingga membuat mereka terpuruk. Banyaknya isu pelanggaran HAM oleh pemerintah dan monarki serta pemerintahan yang sangat represif membuat masyarakat Thailand tertekan dan terbungkam untuk menyuarakan aspirasinya. Hal ini mendorong munculnya kembali gerakan sosial oleh masyarakat yang dipelopori oleh generasi muda Thailand. Maka dari itu, gerakan sosial yang kembali muncul sejak tahun 2019 ini berbentuk sebagai *youth-led movement*. Untuk melawan pemerintah yang represif serta menjalankan agenda penegakkan HAM dan demokrasi mereka, implementasi *youth-led movement* Thailand dijalankan dengan beberapa bentuk aktivisme. Bentuk-bentuk aktivisme ini dijalankan dengan cara-cara lebih modern dan sesuai untuk masa kini. Karena itu, pertanyaan penelitian yang dirumuskan adalah "Bagaimana implementasi *youth-led movement* Thailand terkait pelanggaran HAM pada masa kepemimpinan Prayut Chan-ocha?". Dengan menggunakan konsep gerakan sosial dan aktivisme, penelitian ini menjelaskan bagaimana *youth-led movement* Thailand menjalankan aktivismenya dengan melakukan aksi protes dan demonstrasi, pembuatan karya seni, pemberlakuan boikot, penulisan surat, serta pengadaan kampanye di media sosial dan *platform* daring lainnya.

Kata Kunci: *youth-led movement*, aktivisme, pelanggaran HAM, Thailand, Prayut Chan-ocha

## ABSTRACT

Name : Ciecillia Michelle Savira  
Student Number : 6091901068  
Thesis Title : Thailand's Youth-Led Movement Regarding Human Rights Violations in Thailand During Prayuth Chan-ocha's Leadership

---

Currently, the fulfillment of human rights is still not being done properly in Thailand due to various policies implemented by their prime minister, Prayut Chan-ocha. Prayut, who has held power in Thailand from 2014 to 2023, has made many policies that violate the people's human rights, which has brought them to misery. Numerous issues of human rights violations by the government and the monarchy, as well as a very repressive government have made the Thai people become pressured and silenced to voice their aspirations. This encouraged the re-emergence of a social movement by the people, pioneered by the younger generation of Thailand. Therefore, the social movement that has re-emerged since 2019 is in the form of a youth-led movement. To fight the repressive government and carry out their agenda of upholding human rights and democracy, Thailand's youth-led movement is implemented in numerous forms. These forms of activism are conducted with various ways that are more modern and appropriate for today's world. Hence, the research question formulated is "How is the implementation of Thailand's youth-led movement regarding human rights violations during Prayut Chan-ocha's leadership?". By using the concepts of social movement and activism, this research explains how Thailand's youth-led movement did their activism by conducting protests and demonstrations, making works of art, imposing boycotts, writing letters, and organizing campaigns on social media and other online platforms.

Keywords: youth-led movement, activism, human rights violations, Prayuth Chan-ocha

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmat-Nya lah, penulis akhirnya bisa menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “*Youth-Led Movement Thailand Terkait Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Thailand Pada Masa Kepemimpinan Prayut Chan-ocha*”.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Hubungan Internasional di Universitas Katolik Parahyangan. Penulis berharap skripsi ini dapat berguna untuk membuat para pembaca mengetahui dan memahami implementasi *youth-led movement* Thailand terkait segala isu pelanggaran HAM pada masa kepemimpinan Prayut Chan-ocha.

Dalam pembuatan skripsi ini, penulis sadar telah mendapatkan banyak bimbingan, bantuan, dan inspirasi dari berbagai pihak. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya kepada:

1. Mba Sylvia, selaku dosen pembimbing penulis yang telah membimbing serta memberikan banyak masukan bagi penulisan skripsi ini. Mba Indri dan Mba Mireille sebagai dosen penguji yang sudah memberikan banyak saran dan komentar untuk perbaikan penyusunan skripsi ini.
2. Kedua orang tua penulis, Alm. Maykel Manuel Dirk Raming dan Bernadeth Toeti Savitri Kentjonohadi, yang senantiasa selalu mendukung proses pembelajaran penulis di Universitas Katolik Parahyangan.

3. Teman-teman terdekat penulis yang telah menjadi *support system* serta teman berdiskusi penulis selama menjalani proses pembelajaran, proses berorganisasi, dan penyusunan skripsi.
4. UKM Potret yang telah menjadi wadah bagi penulis untuk mengasah kemampuan berorganisasi serta bakat fotografi dan videografi. Khususnya kepada teman-teman Potret 29 yang terus-menerus memberikan dukungan kepada penulis dalam kehidupan berorganisasi dan pendidikan.
5. Berbagai kelompok dan tokoh *youth-led movement* Thailand yang menjalankan perjuangan mereka. Khususnya kepada War Wanarat Ratsameerat yang dalam menyuarakan aspirasinya telah menginspirasi penulis untuk memilih topik penulisan skripsi ini.
6. HYBS, iKON, dan juga wave to earth. Para musisi yang lagu-lagu dan berbagai karyanya sudah menjadi penyemangat penulis selama mengerjakan skripsi ini.

Bandung, 19 Juni 2023

Ciecillia Michelle Savira



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB 1: PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	5
1.2.1 Deskripsi Masalah.....	5
1.2.2 Pembatasan Masalah.....	11
1.2.3 Perumusan Masalah .....	12
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	12
1.3.2 Kegunaan Penelitian .....	13
1.4 Kajian Literatur .....	13
1.5 Kerangka Pemikiran.....	19
1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data .....	27
1.6.1 Metode Penelitian .....	27
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data.....	27
1.7 Sistematika Pembahasan .....	28
<b>BAB 2: PEMENUHAN HAM PADA MASA REZIM PRAYUT CHAN-OCHA</b> <b>30</b>	
2.1 HAM sebagai Konstruksi Sosial yang Dianut Oleh Masyarakat Thailand ....	30
2.2 Kondisi Pemenuhan HAM pada Masa Rezim Prayut Chan-ocha.....	36
2.2.1 Awal Mula Prayut Chan-ocha Mendapat Kekuasaan dan Naik sebagai PM Thailand .....	36
2.2.2 Kepemimpinan Prayut Chan-ocha sebagai PM Thailand setelah Pemilihan Umum Thailand Tahun 2019 .....	43

2.2.3	Kebijakan-Kebijakan Prayut Chan-ocha yang Melanggar HAM Masyarakat Thailand .....	47
<b>BAB 3: GERAKAN SOSIAL DAN <i>YOUTH-LED MOVEMENT</i> DI THAILAND</b>		<b>56</b>
3.1	Keberadaan Gerakan Sosial di Thailand .....	56
3.1.1	Sejarah Terbentuknya Gerakan sosial di Thailand .....	57
3.1.2	Awal Mula Gerakan Sosial di Thailand saat Prayut Chan-ocha Memegang Kekuasaan.....	64
3.2	Lahirnya <i>Youth-Led Movement</i> di Thailand.....	66
3.2.1	Keberadaan <i>Youth-Led Movement</i> pada Masa Kepemimpinan Prayut Chan-ocha.....	67
<b>BAB 4: IMPLEMENTASI <i>YOUTH-LED MOVEMENT</i> THAILAND PADA MASA KEPEMIMPINAN PRAYUT CHAN-OGCHA</b>		<b>76</b>
4.1	Aksi Protes dan Demonstrasi dari Berbagai Kelompok <i>Youth-Led Movement</i> Thailand.....	82
4.2	Hasil Karya Seni Sebagai Bentuk Opini dan Aspirasi .....	89
4.3	Pemberlakuan Boikot Kepada Beberapa Produk dan Jasa di Thailand .....	94
4.4	Penulisan Surat Kepada Pihak-Pihak Berwenang dan Berkepentingan.....	96
4.5	Pengadaan Kampanye di Media Sosial dan <i>Platform</i> Daring Lainnya.....	100
4.6	Pemenuhan Peran Utama <i>Youth-Led Movement</i> Thailand Saat Melakukan Bentuk-Bentuk Aktivisme.....	103
<b>BAB 5: KESIMPULAN.....</b>		<b>107</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>112</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1.....	90
Gambar 4.2.....	91
Gambar 4.3.....	92

## DAFTAR SINGKATAN

CAT	: Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
CEDAW	: Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women
CPB	: Crown Property Bureau
CPRD	: Convention On The Rights Of Persons With Disabilities
CRC	: Convention on the Rights of the Child
FFP	: Future Forward Party
HAM	: Hak Asasi Manusia
HRC	: Human Rights Council
ICCPED	: International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance
ICCPR	: International Covenant on Civil and Political Rights
ICESCR	: International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
ICJ	: International Commission of Jurists
KKU	: Khon Kaen University
NCPO	: National Council for Peace and Order
NEC	: National Executive Council
NGO	: Non-Governmental Organization
NHRC	: National Human Rights Commission
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PM	: Perdana Menteri
SLAPP	: Strategic Lawsuits Against Public Participation
UDD	: The United Front for Democracy against Dictatorship
UDHR	: Universal Declaration of Human Rights
UFTD	: United Front of Thammasat and Demonstration

## **BAB 1: PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Setiap manusia yang ada di dunia, tidak memandang apa pun latar belakang mereka, pasti memiliki Hak Asasi Manusia (HAM). HAM sendiri merupakan sekumpulan hak dasar yang tidak dapat diganggu gugat dan dirampas oleh orang lain. Berdasarkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), HAM dikatakan sebagai hak-hak inheren yang dimiliki oleh setiap orang tanpa memedulikan segala aspek dari latar belakang mereka, seperti ras, nasionalitas, etnis, agama, jenis kelamin, bahasa, dan lainnya.<sup>1</sup> Dari pengertian tersebut, dapat dimengerti bahwa keberadaan HAM sangatlah mendasar bagi keberlangsungan kehidupan manusia karena setiap aktivitas yang mereka lakukan pastilah didasarkan pada hak apa yang mereka miliki.

Hal penting ini tentunya menjadi perhatian masyarakat global sehingga tepatnya pada tanggal 10 Desember 1948, PBB memproklamasikan *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR).<sup>2</sup> Charles R. Beitz pun mengatakan bahwa HAM merupakan suatu standar bagi para institusi domestik untuk bertindak. Kepuasan para sasaran dari institusi-institusi tersebut selanjutnya menjadi perhatian dunia internasional, tidak hanya pada ranah domestik saja.<sup>3</sup> Maka dari itu, dapat dimengerti bahwa segala hal yang berkaitan dengan HAM, baik itu pencapaian, pelanggaran, ataupun hal lainnya,

---

<sup>1</sup> United Nations, "The Foundation of International Human Rights Law," *United Nations* (United Nations), diakses 25 September, 2022, <https://www.un.org/en/about-us/udhr/foundation-of-international-human-rights-law>.

<sup>2</sup> United Nations, "Universal Declaration of Human Rights," *United Nations* (United Nations), diakses 25 September, 2022, <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>.

<sup>3</sup> Charles R. Beitz, *The Idea of Human Rights* (2009; repr., Oxford: Oxford Univ. Press, 2011). Hlm. 128.

walaupun terjadi secara domestik, tetap saja akan menjadi isu yang berada di ranah masyarakat internasional.

Pelanggaran HAM sendiri dapat terjadi akibat berbagai faktor, seperti perilaku dan struktur pemerintahan suatu negara, konflik bersenjata, faktor-faktor ekonomi, maupun faktor-faktor psikologis.<sup>4</sup> Salah satu faktor penyebab pelanggaran HAM yang sering ditemui adalah dari perilaku dan struktur pemerintahan suatu negara itu sendiri. Hal ini menjadi sangat krusial karena di dalam sistem HAM internasional, pemerintah (negara)lah yang menjadi pengemban utama untuk bertanggungjawab atas pemenuhan HAM rakyatnya.<sup>5</sup> Saat kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka terjadilah kasus pelanggaran HAM oleh pemerintah. Pada kasus pelanggaran HAM oleh pemerintah, sejumlah aktor yang berbeda dapat terlibat pula. Aktor-aktor ini adalah seperti para polisi, hakim, jaksa, pejabat pemerintah, dan banyak lainnya.<sup>6</sup> Mereka akan terlibat pada isu pelanggaran HAM oleh pemerintah secara langsung maupun tidak langsung. Ranah ini pula yang diteliti di dalam penelitian kali ini.

Saat pemerintah melakukan pelanggaran HAM, maka akan ada kemungkinan besar bagi masyarakat untuk bergerak bersama dalam upaya melawan dan memprotes untuk mendapatkan kembali HAM mereka. Hal tersebut sering dikenal sebagai sebuah

---

<sup>4</sup> David Weissbrodt dan Patrick Finnegan, "Human Rights Conditions: What We Know and Why It Matters," *Minnesota Journal of International Law* 28, no. 1 (2019): Hlm. 7, [https://scholarship.law.umn.edu/faculty\\_articles/647](https://scholarship.law.umn.edu/faculty_articles/647).

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Bhaswat Prakash, "Human Rights Violations - a Curse to Society, Culture and Humanity," *LegalServiceIndia* (Legal Service India E-Journal), diakses 25 September, 2022, <https://legalserviceindia.com/legal/article-4222-human-rights-violations-a-curse-to-society-culture-and-humanity.html>.

gerakan sosial. gerakan sosial dapat berfokus pada banyak hal, seperti kondisi ketidakadilan, pelaksanaan perubahan, dan lain-lain. Satu hal yang pasti adalah sekelompok orang ini digerakkan oleh sebuah ide yang sama dan mendasar.<sup>7</sup> Salah satu kelompok dari gerakan sosial yang akhir-akhir ini sedang menjadi perhatian global ialah *youth-led movement*, sebuah gerakan sosial yang dipelopori oleh kaum muda.

Dalam kasus pelanggaran HAM sendiri, memang seharusnya setiap pemerintahan terlebih dahulu menjunjung upaya pencegahannya, terutama karena pemerintah mempunyai kendali pada rezimnya masing-masing. Hal ini tentunya tidak mengecualikan pemerintahan Thailand. Pemerintahan Thailand mempunyai dua tokoh utama yaitu seorang raja sebagai kepala negara dan seorang Perdana Menteri (PM) sebagai kepala pemerintahan. Di dalam kasus ini, PM Thailand mempunyai peran yang sangat krusial. Hal ini dikarenakan seorang PM Thailand dapat memegang kendali atas berjalannya pemerintahan dan administrasi negara.<sup>8</sup> Adapun PM Thailand yang terakhir dan masih berjalan hingga tahun 2023 ialah Prayut Chan-ocha yang memegang kekuasaan dari tahun 2014.<sup>9</sup>

Dengan begitu, dapat dimengerti bahwa sebagai seorang PM, Prayut seharusnya mencegah pelanggaran HAM pada rezimnya. Selain itu, diketahui pula bahwa Thailand

---

<sup>7</sup> Derrick Feldman, "Social Movements for Good: What They Are and How to Lead Them," *Philanthropy Impact* (Philanthropy Impact), diakses 30 September, 2022, <https://www.philanthropy-impact.org/expert-opinion/social-movements-good-what-they-are-and-how-lead-them>.

<sup>8</sup> Thailand Law Forum, "THAI GOVERNMENTAL STRUCTURE (under Thailand's 1997 [B.E. 2540] Constitution)," *thailawforum* (Thailand Law Forum), diakses 25 September 2022, <http://thailawforum.com/articles/briggsgov.html>.

<sup>9</sup> Britannica, "Security of Thailand," *Britannica* (Britannica), diakses 25 September 2022, <https://www.britannica.com/place/Thailand/Security>.

menjadi salah satu dari 48 negara pertama yang mempromosikan UDHR.<sup>10</sup> Dasar-dasar yang kuat ini seharusnya mendukung rezim Prayut menjadi sebuah kepemimpinan yang menyokong pemenuhan HAM rakyatnya dengan cukup baik, namun apa yang terjadi di Thailand merupakan sebaliknya. Selama memimpin Thailand sebagai PM mereka, ada banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh Prayut ternyata melanggar HAM masyarakat. Selain itu, perilakunya selama memimpin juga tidak memenuhi HAM yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat Thailand. Ini lah yang menjadi awal mula kebangkitan kembali *youth-led movement* Thailand untuk bergerak melawan Prayut dan melaksanakan bentuk-bentuk aktivisme mereka.

Topik ini menjadi menarik untuk diteliti karena generasi muda yang merupakan generasi penerus masa depan dapat memelopori bergeraknya sebuah gerakan sosial. Munculnya sebuah *youth-led movement* memperlihatkan kepedulian generasi muda terhadap isu-isu yang sedang ada sekarang ini. Selain itu, *youth-led movement* juga menandakan adanya urgensi untuk mengatasi berbagai isu yang sedang berjalan agar membawa kebaikan pada masa sekarang dan masa depan nanti.

---

<sup>10</sup> คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก, “Human Rights and Social Issues,” *unmissionnewyork.thaiembassy* (Permanent Mission of Thailand to the United Nations, 7 September, 2017), diakses 25 September 2022, <https://unmissionnewyork.thaiembassy.org/en/page/80917-human-rights?menu=5d81c6aa15e39c28900078fa>.



## 1.2 Identifikasi Masalah

### 1.2.1 Deskripsi Masalah

Masalah pelanggaran HAM yang ada di Thailand menjadi salah satu contoh hasil dari perilaku pemerintah, terutama dalam konteks ini ialah pemimpinnya yaitu Prayut.<sup>11</sup> Untuk melihat secara runtut bagaimana hal ini dapat terjadi, kita pertama-tama harus mengerti terlebih dahulu bagaimana pemimpin Thailand dapat mempunyai kekuasaan dan kendali yang begitu besar. Kenaikan Prayut menjadi PM Thailand tidaklah seperti biasanya. Hal ini dimulai saat posisi karirnya melejit naik menjadi Infanteri ke-21 yang dikenal bergengsi. Berkat hasil kerjanya yang amat baik, Prayut dapat menaiki beberapa jabatan tinggi di militer. Namun begitu, saat ia menduduki pangkat mayor jenderal pada tahun 2006, sebuah kudeta militer terjadi di Thailand.<sup>12</sup>

Kudeta sendiri adalah sebuah pelaksanaan kekuatan yang sudah direncanakan secara seksama dan dilaksanakan tiba-tiba dalam ranah politik, khususnya bertujuan untuk adanya penggulingan kekuasaan dengan kekerasan ataupun perubahan di dalam pemerintahan dengan grup-grup yang sudah ada.<sup>13</sup> Kudeta militer yang terjadi pada tahun 2006 tersebut berarti kekuatan yang dimaksud merupakan kekuatan militer Thailand. Pada kejadian itu, militer berhasil menggulingkan PM yang sedang menjabat yaitu PM Thaksin Shinawatra. Konstitusi dan PM yang baru dihasilkan setelahnya,

---

<sup>11</sup> Human Rights Watch, "Thailand: New Government Disregards Rights," *HRW* (Human Rights Watch), 24 Juli, 2019), diakses 20 Oktober 2022, <https://www.hrw.org/news/2019/07/24/thailand-new-government-disregards-rights>.

<sup>12</sup> Britannica, "Prayuth Chan-Ocha," *Britannica* (Britannica), diakses 25 September, 2022, <https://www.britannica.com/biography/Prayuth-Chan-ocha>.

<sup>13</sup> David Remnick, "Coup," *Merriam Webster* (Merriam Webster), diakses 25 September, 2022, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/coup>.

membuat Yingluck Shinawatra, adik dari Thaksin, menjadi PM Thailand yang selanjutnya. Namun begitu, kedudukan Yingluck sebagai PM Thailand yang baru dipercaya hanya sebagai perpanjangan tangan Thaksin. Akibatnya, Prayut serta pejabat-pejabat lainnya tidak setuju akan kenaikan tersebut dan menyuarakan protes mereka.<sup>14</sup>

Beberapa tahun berjalan, pangkat Prayut kembali naik menjadi panglima tentara Thailand pada 2010 dan tiga tahun kemudian kondisi politik Thailand semakin memburuk. Fraksi anti dan pro-Thaksin berseteru dan menyebabkan porak poranda di dalam masyarakat, terutama pada puncaknya yaitu akhir tahun 2013. Setelah beberapa bulan memasuki tahun baru dan keadaan masih sangat buruk, tepatnya pada 22 Mei 2014 akhirnya militer pun bergerak mengimplementasikan kudeta militer di Thailand. Prayut memimpin gerakan tersebut dan membuat *draft* konstitusi di mana ia akan dibebaskan dari segala tanggung jawab akibat kudeta yang sedang dijelankannya.<sup>15</sup>

Keinginan Prayut untuk memimpin Thailand yang dituangkannya dalam *draft* konstitusi tersebut ternyata terlaksanakan. Sebuah badan legislatif baru yang berisikan anggota militer dan pejabat-pejabat polisi bernamakan National Council for Peace and Order (NCPO) dibentuk.<sup>16</sup> Para anggota ini dipilih secara langsung oleh junta,<sup>17</sup> kelompok militer yang memimpin negara setelah mendapatkan kekuasaannya dengan

---

<sup>14</sup> Britannica, "Prayuth Chan-Ocha," *Britannica* (Britannica), diakses 25 September, 2022, <https://www.britannica.com/biography/Prayuth-Chan-ocha>.

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> BBC, "Prayuth Chan-Ocha: Thailand's Face of Hybrid Democracy," *BBC* (BBC, 8 September, 2020), diakses 25 September, 2022, <https://www.bbc.com/news/world-asia-27526495>.

<sup>17</sup> Britannica, "Prayuth Chan-Ocha," *Britannica* (Britannica), diakses 25 September, 2022, <https://www.britannica.com/biography/Prayuth-Chan-ocha>.

paksa.<sup>18</sup> Mereka kemudian menominasikan Prayut, yang juga merupakan calon tunggal pada saat itu, sebagai PM Thailand yang baru. Tepatnya pada 25 Agustus 2014, Prayut pun secara formal dinobatkan sebagai PM Thailand oleh Raja Bhumibol Adulyadej.<sup>19</sup> Dari pada saat itu, era rezimnya pun dimulai.

Sebagai PM Thailand yang baru, ada banyak hal yang dijanjikan oleh Prayut kepada masyarakat Thailand, terlebih lagi yang berkaitan erat dengan HAM. Di dalam kebijakannya, ia berjanji untuk menegakkan monarki, memberhentikan perdagangan manusia, memberhentikan insurgensi terhadap umat Muslim yang terjadi di provinsi-provinsi bagian Selatan, dan memerangi korupsi.<sup>20</sup> Tetapi faktanya, hal-hal yang berkebalikan dari janjinya mulai bermunculan dan mengganggu HAM masyarakat luas. Dengan kendali yang ia miliki, Prayut memberlakukan Konstitusi Interim 2014 yang memberikan pemerintahan militernya kekuasaan yang begitu besar. Pada 'Section 44' dari konstitusinya memastikan otoritas absolut bagi pemerintah untuk memerintahkan apa pun terhadap hal-hal yang dilihat sebagai ancaman bagi keberlangsungan ketertiban negara, keamanan negara, maupun eksistensi monarki.<sup>21</sup>

Dari konstitusi miliknya saja, dapat dilihat bahwa pemerintahan Prayut terkesan tidak ingin ada hal yang mengganggu keberlangsungan pemerintahannya, termasuk

---

<sup>18</sup> Oxford Advanced American Dictionary, "Junta," *Oxford Learners Dictionaries* (Oxford Advanced American Dictionary), diakses 25 September, 2022, <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/junta>.

<sup>19</sup> Britannica, "Prayuth Chan-Ocha," *Britannica* (Britannica), diakses 25 September, 2022, <https://www.britannica.com/biography/Prayuth-Chan-ocha>.

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> BBC, "Prayuth Chan-Ocha: Thailand's Face of Hybrid Democracy," *BBC* (BBC, 8 September, 2020), diakses 25 September, 2022, <https://www.bbc.com/news/world-asia-27526495>.

adanya kritik atau aspirasi dari rakyat kepada pemerintah serta monarki. Yang lebih mengesankan ialah tidak hanya pemberlakuan kekuasaan absolut bagi pemerintahannya, namun ada banyak kasus pelanggaran HAM yang ikut terjadi dan berkaitan erat dengan keberadaan militer junta. Forum-forum politik perlahan mulai dilarang, kebebasan berbicara masyarakat dibungkam, dan bahkan ia mulai mengimplementasikan *martial law*.<sup>22</sup> *Martial law* sendiri mendukung keabsolutan kekuatan pemerintah karena saat hal ini diimplementasikan, maka komandan militer atau pemimpin di suatu area ataupun negara mempunyai otoritas tidak terbatas untuk membuat dan melaksanakan hukum apa pun.<sup>23</sup>

Pemenuhan HAM bagi masyarakat Thailand pun kian menipis dan bahkan ditelantarkan oleh pemerintah pada rezim Prayut. Dengan posisi mereka yang sudah mendapat tekanan dari kekuatan absolut pemerintah, ditambah lagi dengan berbagai kasus pelanggaran HAM lainnya, masyarakat tidak dapat menyampaikan aspirasinya masing-masing. Dalam kondisi ini, Prayut masih mempertahankan kebenaran rezimnya. Dilansir dari berita TIME, ia mengatakan bahwa “*When people are in trouble, we, the soldiers, are there for them,*” yang artinya adalah saat masyarakat ada di dalam masalah, kami, para prajurit, ada untuk mereka.<sup>24</sup> Namun hal ini tentunya kembali dipertanyakan oleh rakyat Thailand. Sampai kapan mereka akan berada di sana untuk rakyat? Mengapa

---

<sup>22</sup> Britannica, “Prayuth Chan-Ocha,” *Britannica* (Britannica), diakses 25 September, 2022, <https://www.britannica.com/biography/Prayuth-Chan-ocha>.

<sup>23</sup> E. W. Killam, “Martial Law in Times of Civil Disorder,” *Law and Order* 37, no. 9 (September 1989): Hlm. 1, <https://www.ojp.gov/ncjrs/virtual-library/abstracts/martial-law-times-civil-disorder>.

<sup>24</sup> Charlie Campbell, “Thailand’s Leader Promised to Restore Democracy. Instead He’s Tightening His Grip,” *TIME* (TIME, 21 Juni, 2018), diakses 25 September 2022, <https://time.com/5318235/thailand-prayuth-chan-ocha/>.

yang terjadi di lingkup masyarakat berbeda dari apa yang dijanjikan sejak Prayut memenangkan kudetanya dan memegang kekuasaan sejak 2014 lalu?

Isu HAM pada ranah kebebasan untuk berkumpul, kebebasan untuk berserikat, kebebasan untuk berekspresi, penyiksaan (oleh polisi), penghilangan orang secara paksa, dan lainnya banyak bermunculan.<sup>25</sup> Selain itu, banyak kasus impunitas untuk pelanggaran HAM yang biasanya diberikan pada para junta. Di lain sisi, rezim Prayut tidak memberikan proteksi bagi para aktivis dan pembela HAM, melainkan berusaha untuk menekan mereka.<sup>26</sup>

Tekanan kepada masyarakat semakin besar hingga bahkan kepada mereka yang mengatakan bahwa Prayut telah melanggar HAM, ia berbalik mempertahankan dirinya dan mengatakan bahwa orang-orang tersebut harus mengerti bahwa negara mereka sedang beroperasi di keadaan yang tidak biasa.<sup>27</sup> Dari paparan ini kita bisa melihat bagaimana rakyat Thailand telah kehilangan ‘suara’ mereka, terutama dalam berekspresi dalam bidang politik. Kata-kata Prayut yang dilansir dari media yaitu *“No one can oppose me. If they still don’t learn that, they will be detained again and again.... I might tape their mouths shut, too.”*<sup>28</sup> memperlihatkan sebagaimana bahayanya bagi

---

<sup>25</sup> Amnesty International, “Thailand 2021,” *amnesty* (Amnesty International), diakses 25 September 2022, <https://www.amnesty.org/en/location/asia-and-the-pacific/south-east-asia-and-the-pacific/thailand/report-thailand/>.

<sup>26</sup> Human Rights Watch, “Thailand: New Government Disregards Rights Policy Statement Fails to Address Major Concerns,” *HRW* (Human Rights Watch, 24 Juli, 2019), diakses 25 September 2022, <https://www.hrw.org/news/2019/07/24/thailand-new-government-disregards-rights>.

<sup>27</sup> Rishi Iyengar, “The Thai Junta Leader Has Defended Rights Abuses in His Year-End Speech,” *TIME* (TIME, 23 Desember, 2015), diakses 25 September 2022, <https://time.com/4159825/thailand-prime-minister-prayuth-speech-human-rights/>.

<sup>28</sup> Human Rights Watch, “To Speak Out Is Dangerous Criminalization of Peaceful Expression in Thailand,” *HRW* (Human Rights Watch, 24 Oktober, 2019), diakses 25 September 2022,

masyarakat Thailand untuk sekadar beropini karena mereka pasti akan berada di posisi yang bahaya jika melawan pemerintah.

Kondisi represi ini terus berlanjut hingga beberapa tahun silam. Masyarakat Thailand pun mulai terusik dan muncul lah kelompok-kelompok di dalam masyarakat yang membahas mengenai isu-isu pelanggaran HAM yang dialami mereka. Dari berbagai kelompok di dalam masyarakat tersebut, ada kelompok-kelompok yang berisikan dan dipelopori oleh generasi muda. Mereka mulai mempunyai keberanian kembali untuk perlahan membuka suaranya dan menggaungkan ide perubahan sosial di dalam masyarakat. Dengan ide aktivisme yang kuat, kelompok-kelompok ini kemudian bersatu di bawah payung *youth-led movement* Thailand dan bergerak untuk melawan kepemimpinan Prayut. Walaupun pemerintah terus menerus menyerang mereka dan mengancam untuk tidak menyinggung pemerintahan, rakyat Thailand tetap menginginkan hal yang paling utama yaitu HAM mereka dan demokrasi bagi negara mereka.<sup>29</sup>

Selain pelanggaran HAM oleh pemerintah yang semakin marak, kebangkitan *youth-led movement* Thailand yang masif ini juga dipicu oleh banyak hal. Salah satu dari beberapa pemicu tersebut ialah dibubarkannya Future Forward Party (FFP) yang mempunyai nama dan banyak dukungan dari muda mudi Thailand.<sup>30</sup> Karenanya, sontak

---

<https://www.hrw.org/report/2019/10/24/speak-out-dangerous/criminalization-peaceful-expression-thailand>.

<sup>29</sup> John Sifon, "Thailand's Faux Democracy Shouldn't Be Treated like a Real One," HRW (Human Rights Watch, 8 Juli, 2019), diakses 25 September 2022, <https://www.hrw.org/news/2019/07/08/thailands-faux-democracy-shouldnt-be-treated-real-one>.

<sup>30</sup> Justin Ong, "Explainer: What the Youth-Led Protest in Thailand Is about and the Factors Fuelling It," todayonline (Today, 19 Oktober, 2020), diakses 25 September 2022,

para muda-mudi Thailand mulai murka dan memilih untuk melawan pemerintahan Prayut.

*Youth-led movement* yang bergerak secara domestik dan internasional ini kemudian menjadi perhatian publik. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, walaupun isu pelanggaran HAM ini terjadi secara domestik di dalam Thailand saja, namun hal ini tetap menjadi isu dan perhatian dunia internasional. Didorong pula dengan kondisi pembungkaman masyarakat, maka *youth-led movement* membutuhkan atensi serta bantuan dari masyarakat internasional agar dapat menanggulangi isu tersebut dan menegakkan HAM serta mendapatkan demokrasi. *Youth-led movement* Thailand sebagai sebuah gerakan sosial bersama-sama melakukan berbagai bentuk kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut. Karena itu, perlu dilihat implementasi *youth-led movement* Thailand terkait dengan pelanggaran HAM pada masa kepemimpinan Prayut.

### **1.2.2 Pembatasan Masalah**

Pada penelitian kali ini, pembahasan mengenai implementasi *youth-led movement* Thailand terkait berbagai pelanggaran pada masa kepemimpinan Prayut Chan-ocha hanya dibahas pada linimasa rezim PM Prayut Chan-ocha, tepatnya dari tahun 2019 hingga 2022. Hal ini dikarenakan *youth-led movement* Thailand mulai muncul kembali sejak tahun 2019 pada masa kepemimpinan Prayut. Selain itu, 2022

---

<https://www.todayonline.com/singapore/explainer-what-youth-led-protest-thailand-about-and-factors-fuelling-it>.

menjadi tahun puncak pergerakan *youth-led movement* Thailand sebelum adanya pemilihan umum pada tahun 2023.

Sesuai dengan pemaparan sebelumnya, latar belakang tempat yang ada di penelitian ini adalah Thailand. Adapun aktor-aktor signifikan yang dibahas di dalam penelitian ini adalah para entitas kelompok masyarakat yang terintegrasi menjadi *youth-led movement* Thailand, Prayut Chan-ocha sebagai PM Thailand pada masanya, dan monarki Thailand. Selain itu, penelitian ini hanya membahas kegiatan-kegiatan aktivisme yang berkaitan dengan bentuk implementasi *youth-led movement* Thailand terkait pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Prayut saja.

### **1.2.3 Perumusan Masalah**

Dari paparan di atas, maka penulis merumuskan pertanyaan penelitian sebagai "Bagaimana implementasi *youth-led movement* Thailand terkait pelanggaran HAM pada masa kepemimpinan Prayut Chan-ocha?"

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk implementasi *youth-led movement* Thailand terkait dengan pelanggaran HAM yang terjadi pada masa kepemimpinan Prayut Chan-ocha.



### 1.3.2 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian kali ini adalah agar pembaca mengetahui dan memahami implementasi *youth-led movement* Thailand terkait segala pelanggaran HAM pada masa kepemimpinan Prayut Chan-ocha berjalan. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian lainnya yang mengkaji tentang aktivisme, gerakan sosial, ataupun yang berada pada ranah isu yang sama yaitu pelanggaran HAM terutama di Thailand dan pada masa kepemimpinan Prayut Chan-ocha.

## 1.4 Kajian Literatur

Banyaknya isu pelanggaran HAM yang masih terjadi di dunia masa kini menyebabkan generasi muda juga ikut menyuarakan aspirasi mereka terkait hal tersebut. Aleksandar Prvulovic dalam tulisannya mengenai *youth-led movement* mengatakan bahwa kaum muda di dunia barat sering dianggap tidak memiliki ketertarikan terhadap politik dan keterlibatan sipil. Padahal yang terjadi sebenarnya berbeda dengan anggapan tersebut. Gerakan sosial seperti *Occupy Wall Street* dan *Indignados* memperlihatkan bahwa generasi muda mulai melibatkan diri dalam pelaksanaan aktivisme di tengah masyarakat. Kondisi ini membuat para pengamat dan organisasi mulai menaruh atensi yang lebih kepada keberadaan dan pergerakan generasi muda. Berbagai aksi dari generasi muda ini lah yang menjadi *youth-led movement* dan patut diteliti, dipelajari, dan didukung secara lebih lanjut.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Aleksandar Prvulovic, Learning From Young People: Youth-Led Social Movements As Models For Modern Civic Youth Activism Within Traditional NGOs, *Democracy in Crisis: The Dynamics of Civil Protest and Civil Resistance* (LIT Verlag Münster, 2013), 185-205.

Semenjak isu pelanggaran HAM pada masa kepemimpinan Prayut mencuat, sudah ada banyak penstudi yang mencoba untuk mengkaji fenomena *youth-led movement* di Thailand beserta hal-hal yang terjadi di dalam pergerakan tersebut. Dimulai dari Sonia Lam-Knott dan Yi'En Cheng (2020), mereka mengkaji tentang pergerakan dan politik kaum muda di kawasan Asia. Di dalam "*Youth politics in Urban Asia: An Introduction*," Lam-Knott dan Cheng mengatakan bahwa di kawasan Asia sendiri, ada sebuah ledakan *youth-led movement* yang berkaitan erat dengan kondisi politik negara. Dilihat dari aspek etnografis negara-negara di Asia, kondisi sosial di dalam negara-negara ini menyediakan kondisi yang mendukung bagi para kaum muda untuk memulai pergerakan.<sup>32</sup>

Lebih lanjut, para penstudi juga banyak mengkaji secara spesifik mengenai *youth-led movement* di Thailand. Janjira Sombatpoonsiri (2021) memaparkan bagaimana *youth-led movement* yang muncul di Thailand menjadi sebuah inspirasi pergerakan sosial lainnya di negara-negara lain di dalam Asia Tenggara. Kejadian protes Thailand 2020 dikatakan menjadi sebuah titik kritis bagi dunia untuk melihat bagaimana Thailand mengalami keadaan represi berat dari pemerintah.<sup>33</sup>

Sudah ada beberapa literatur yang mengkaji tentang strategi dari pergerakan *youth-led movement* Thailand itu sendiri. Charles Erize P. Ladia (2022) di dalam tulisannya yaitu "*Thai Youth in Protest: Transnational Inspiration and Local*

---

<sup>32</sup> Sonia Lam-Knott dan Yi'En Cheng, "Youth Politics in Urban Asia: An Introduction," *Space and Polity* 24, no. 1 (2 Januari, 2020): 1–11, <https://doi.org/10.1080/13562576.2020.1732200>.

<sup>33</sup> Janjira Sombatpoonsiri, "From Repression to Revolt: Thailand's 2020 Protests and the Regional Implications," *GIGA Focus Asien* 1 (2021): 1–12, <https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-71730-3>.

*Adaptation in the Repertoires of Contention of the 2020 Bangkok Youth-led Democratization Movement*” mengkaji mengenai strategi yang digunakan *youth-led movement* Thailand, seperti dependensi terhadap media sosial, filosofi “*be like water,*” dan berbagai signal verbal maupun non-verbal. Ladia mengatakan bahwa strategi yang digunakan oleh kaum muda ini bernuansa campuran antara demokratisasi transnasional dan juga domestik.<sup>34</sup>

Sejalan dengan Ladia, Sombatpoonsiri bersama dengan Thammachat Kri-aksorn (2021) di dalam “*Taking Back Civic Space: Nonviolent Protests and Pushbacks against Autocratic Restrictions in Thailand,*” juga mengatakan bahwa logika untuk menjalankan protes tanpa kekerasan serta kreativitas digital dapat menanggulangi represi dari pemerintah.<sup>35</sup> Di lain sisi, Duncan McCargo (2021) di dalam kajiannya yaitu “*Disruptors’ dilemma? Thailand’s 2020 Gen Z Protest,*” mengatakan bahwa walaupun kaum muda ini bergerak secara bersama untuk menanggulangi masalah yang ada, mereka masih kurang siap dalam agenda-agenda pergerakan yang jelas.<sup>36</sup>

Selain dengan adanya dua perspektif yang berbeda dalam keberhasilan strategi *youth-led movement* Thailand dari beberapa penulis di atas, sudah ada beberapa penstudi yang mengkaji pergerakan ini secara lebih spesifik pada setiap entitas yang terintegrasi

---

<sup>34</sup> Charles Erize P. Ladia, “Thai Youth in Protest: Transnational Inspiration and Local Adaptation in the Repertoires of Contention of the 2020 Bangkok Youth-Led Democratization Movement,” *Philippine Journal for Public Policy: Interdisciplinary Development Perspectives* 2022, no. 3 (2022): 105–137, <https://doi.org/10.54096/ZNOV6892>.

<sup>35</sup> Janjira Sombatpoonsiri dan Thammachat Kri-aksorn, “Taking Back Civic Space: Nonviolent Protests and Pushbacks against Autocratic Restrictions in Thailand,” *1*, no. 1 (17 November, 2021): 80–108, <https://doi.org/10.1163/2667372x-bja10006>.

<sup>36</sup> Duncan McCargo, “Disruptors’ Dilemma? Thailand’s 2020 Gen Z Protests,” *Critical Asian Studies* 53, no. 2 (2 Maret, 2021): 175–91, <https://doi.org/10.1080/14672715.2021.1876522>.

di dalam *youth-led movement* Thailand. Kanokrat Lertchoosakul (2021) dalam kajiannya di dalam “*The white ribbon movement: high school students in the 2020 Thai youth protests,*” mengkaji tentang bagaimana awal mula para siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) melibatkan diri dalam protes kaum muda Thailand. Ia mengatakan bahwa anak-anak SMA ini tidak hanya menuntut reformasi, namun juga menyatakan perlawanan mereka terhadap normal dan sistem edukasi Thailand yang konservatif dan menekan mereka.<sup>37</sup>

Pada ranah yang sama dengan literatur tersebut, para penulis di dalam “*Understanding the Social Environment Determinants of Student Movements: A Consideration of Student Activism in Thailand and the Thai “Social Cage,”*” (2019) juga pernah mengkaji tentang pengaruh yang dimiliki para pelajar aktivis ini pada kondisi represi di Thailand. Mereka mengatakan bahwa dinamika politik, sosial, serta ekonomi dapat sangat terpengaruh oleh pergerakan para pelajar aktivis ini.<sup>38</sup> Selain itu, Siwach Sripokangkul, Autthapon Muangming, dan juga Thomas Vulsma (2017) mengkaji tentang para pelajar aktivis yang bergabung di dalam kelompok Dao Din. Dao Din yang sebelumnya menjadi pahlawan masyarakat terpukul menjadi korban represi masyarakat konservatif. Di dalam “*Dao Din Student Activists: From Hope to Victims under the Thai Society of Darkness,*” para penulis berargumen bahwa perubahan kondisi

---

<sup>37</sup> Kanokrat Lertchoosakul, “The White Ribbon Movement: High School Students in the 2020 Thai Youth Protests,” *Critical Asian Studies* 53, no. 2 (15 Februari, 2021): 206–18, <https://doi.org/10.1080/14672715.2021.1883452>.

<sup>38</sup> Siwach Sripokangkul et al., “Understanding the Social Environment Determinants of Student Movements: A Consideration of Student Activism in Thailand and the Thai ‘Social Cage,’” *International Journal of Asia Pacific Studies* 15, no. 1 (15 Januari, 2019): 59–96, <https://doi.org/10.21315/ijaps2019.15.1.3>.

tersebut disebabkan akibat perlawanan Dao Din terhadap kudeta militer yang terjadi di tahun 2014 silam.<sup>39</sup>

Lebih lanjut, ada juga beberapa literatur yang mengkaji lebih dalam mengenai pergerakan *youth-led movement* yang memanfaatkan teknologi dan berada di dalam ranah media sosial. Salah satu di antaranya yaitu “*Hashtag activism: social media and the #FreeYouth protests in Thailand*”. Di dalam kajian tersebut, Aim Sinpeng (2021) mengatakan bahwa Twitter menjadi sebuah *platform* utama bagi para pemuda Thailand untuk menyuarakan aspirasinya dan saling terhubung satu sama lainnya, terutama dengan berbagai tagar yang mereka buat di media sosial tersebut.<sup>40</sup>

Beberapa penstudi di Indonesia juga pernah membuat kajian di ranah yang sama. “Pengaruh Gerakan Mahasiswa Terhadap Upaya Penegakan Demokrasi di Thailand pada Masa Pemerintahan PM Prayuth Chan-Ocha (2014-2020)” yang ditulis oleh Akmal Maulana AR (2022) berfokus pada pengaruh gerakan mahasiswa Thailand pada demokrasi negara tersebut menggunakan pendekatan TAN (Jaringan Advokasi Transnasional).<sup>41</sup> Selain itu, “*Thai Protest 2020: Gagalnya Sebuah Upaya Gerakan Sosial Melawan Dominasi Militer*” (2022) juga mengkaji topik yang sama dengan

---

<sup>39</sup> Siwach Sripokangkul, Autthapon Muangming, dan Thomas Vulmsa, “ดาวดิน : จากความหวังสู่เหยื่อกับความมืดบอด ในอนาคตของสังคมไทย,” *วารสารการบริหารปกครอง* 6, no. 2 (2017): 448–82, <https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/109794/86216>.

<sup>40</sup> Aim Sinpeng, “Hashtag Activism: Social Media and the #FreeYouth Protests in Thailand,” *Critical Asian Studies* 53, no. 2 (28 Februari, 2021): 192–205, <https://doi.org/10.1080/14672715.2021.1882866>.

<sup>41</sup> Akmal Maulana AR, “Pengaruh Gerakan Mahasiswa Terhadap Upaya Penegakan Demokrasi Di Thailand Pada Masa Pemerintahan PM Prayuth Chan-Ocha (2014-2020),” (2022), <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/38467/18323103.pdf>.

berfokus pada pola gerakan *Thai Protest 2020* yang menunjukkan bahwa gerakan ini masih belum berhasil untuk membawa perubahan di Thailand.<sup>42</sup>

Dari beberapa paparan literatur di atas, dapat dilihat bahwa sudah ada banyak penstudi yang mengkaji tentang tercetusnya *youth-led movement* di Asia, keberadaannya di Thailand, hingga yang secara spesifik mengkaji tentang setiap entitas yang ada di dalam gerakan tersebut. Para penulis literatur-literatur di atas juga tidak berada di satu kubu yang sama, melainkan ada pandangan yang berbeda. Walaupun begitu, belum banyak penstudi yang memaparkan secara menyeluruh bentuk-bentuk aktivisme apa saja yang dilakukan para muda-mudi Thailand yang terintegrasi di bawah payung besar *youth-led movement* terkait pelanggaran HAM pada masa kepemimpinan Prayut Chan-ocha.

Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan entitas-entitas mana saja yang sebenarnya terintegrasi di dalam *youth-led movement*, apa saja yang mereka lakukan terkait pelanggaran HAM yang terjadi, dan juga bagaimana mereka melaksanakan hal-hal tersebut dalam realitanya. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan konstruktivisme yang berfokus pada HAM sebagai sebuah konstruksi sosial, serta beberapa konsep yaitu gerakan sosial, dan aktivisme untuk melihat bagaimana cikal bakal isu dan pergerakan dapat tercipta.

---

<sup>42</sup> Renada Elinna Carolinna, Najamuddin Khairur Rijal, dan Muhammad Fadzryl Adzmy, “Thai Protest 2020: Gagalnya Sebuah Upaya Gerakan sosial Melawan Dominasi Militer,” *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial* 7, no. 2 (21 Juni, 2022): 153–166, <https://doi.org/https://doi.org/10.33506/jn.v7i2.1751>.

## 1.5 Kerangka Pemikiran

Untuk membantu penulis menjelaskan tentang fenomena *youth-led movement* di Thailand serta bagaimana implementasinya terkait berbagai pelanggaran HAM pada masa kepemimpinan Prayut Chan-ocha, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan dan konsep. Adapun pendekatan yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu pendekatan konstruktivisme dan konsep yang digunakan yaitu konsep gerakan sosial serta aktivisme.

Pada masa setelah Perang Dingin berakhir kondisi dunia menjadi lebih terbuka sehingga kesempatan bagi pemahaman baru untuk muncul juga mulai terbuka. Konstruktivisme pertama kali muncul akibat berbagai diskusi yang terjadi di kalangan neorealis dan liberalis. Selain itu, berbagai perkembangan teoretis yang terjadi di disiplin ilmu sosial lainnya turut mendorong pendekatan konstruktivisme untuk berada di kalangan masyarakat. Sebagai salah satu teori sosial, konstruktivisme menempatkan diri untuk menitikberatkan konstruksi sosial dari kejadian atau realita yang ada.<sup>43</sup> Hal ini berarti pendekatan konstruktivisme sangat berpacu pada berbagai konstruksi sosial yang ada di kehidupan masyarakat.

Alexander Wendt, salah satu penstudi konstruktivis yang terkemuka, mengatakan bahwa karakteristik serta relasi yang dimiliki oleh kehidupan pada ranah internasional lebih dibentuk oleh fenomena sosial daripada material. Hal ini dikarenakan

---

<sup>43</sup> Robert H Jackson dan Georg Sørensen, *Introduction to International Relations : Theories and Approaches*, 5th ed. (Oxford: Oxford University Press, 2013), hlm. 211

dasar dari sosialitas itu sendiri adalah pengetahuan bersama (*shared knowledge*).<sup>44</sup> Maka dari itu, fenomena yang terjadi di dalam kehidupan manusia akan lebih banyak berpacu pada struktur sosial yang mereka miliki karena ide-ide yang ada di dalam pengetahuan bersama tersebut akan menjadi cikal bakal relasi dan interaksi manusia.

Salah satu aspek dari struktur sosial yang memainkan peran dalam membentuk pengetahuan bersama ialah peraturan ataupun norma sosial. Para konstruktivis juga lebih sering untuk menyebut hal ini sebagai *international institutions*. *International institutions* yang dimaksud di sini bukanlah berarti institusi atau organisasi formal yang dapat dilihat secara fisik, namun para konstruktivis mengartikan ‘institusi’ ke arah sosiologis. Dengan begitu, *international institutions* ataupun norma sosial dilihat sebagai seperangkat ekspektasi/harapan sosial yang ditetapkan untuk melihat bagaimana sebuah relasi seharusnya bekerja.<sup>45</sup> Hal ini lah yang akan menjadi pengetahuan bersama dan juga pedoman interaksi sebuah kelompok masyarakat.<sup>46</sup>

Setiap proses ataupun aktivitas yang telah disebutkan sebelumnya merupakan sebuah konstruksi sosial yang menjadi acuan pendekatan konstruktivisme itu sendiri. Salah satu konstruksi sosial yang sudah banyak diemban oleh masyarakat dunia dan diimplementasikan di berbagai ranah kehidupan adalah HAM. Konsep mendasar dari HAM itu sendiri merupakan seperangkat hak individual maupun kolektif yang telah

---

<sup>44</sup> Alexander Wendt, *Social Theory of International Politics* (1999; repr., Cambridge; New York; Cambridge University Press, 2003), hlm. 20

<sup>45</sup> Richard Devetak, Anthony Burke, dan Jim George, *An Introduction to International Relations*, 2nd ed. (Cambridge ; New York: Cambridge University Press, 2012), hlm. 108

<sup>46</sup> Matthew J. Hoffmann, “Norms and Social Constructivism in International Relations,” *Oxford Research Encyclopedia of International Studies*, 1 Maret, 2010, <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190846626.013.60>.



dipromosikan dan dilindungi secara formal lewat hukum-hukum internasional maupun domestik. Teori, pandangan, dan argumen mengenai HAM sendiri memang sudah ada sejak dulu kala, namun keberadaan HAM sebagai suatu perlindungan legal yang terus berevolusi mulai meningkat setelah adanya UDHR pada tahun 1948. Secara umum, kategori hak yang dilindungi oleh HAM sendiri mencakup: hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya, serta hak solidaritas.<sup>47</sup> Beitz juga mengatakan bahwa negara bertanggung jawab untuk memenuhi HAM rakyatnya dan jika mereka gagal melakukan hal tersebut, maka dunia internasional dapat berperan sebagai sebuah agen untuk mendorong mereka agar dapat memperbaiki kegagalan tersebut.<sup>48</sup>

Saat kedua hal tersebut dikaitkan, maka dapat terjadi kondisi di mana HAM menjadi sebuah konstruksi sosial, seperti apa yang Benjamin Gregg katakan di dalam bukunya yang berjudul "*Human Rights as Social Construction.*" Di sini, ia mengatakan bahwa HAM sebagai sebuah konstruksi sosial akan menjadi valid bagi komunitas yang menganutnya. Ia berargumen bahwa pencapaian moral yang paling tinggi bagi manusia ialah dengan memberikan dirinya sendiri norma-norma sosial. Maka dari itu, manusia harus mengonstruksi sebuah kumpulan peraturan yang dapat memadai segala latar belakang agar dapat menjadi sebuah acuan mereka tersendiri dalam menggunakan HAM di dalam kehidupan sehari-hari.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Todd Landman, *Studying Human Rights* (London: Routledge, 2006), hlm. 8

<sup>48</sup> Charles R. Beitz, *The Idea of Human Rights* (2009; repr., Oxford: Oxford Univ. Press, 2011), hlm. 13

<sup>49</sup> Benjamin Gregg, *Human Rights as Social Construction* (Cambridge ; Madrid: Cambridge University Press, 2013), hlm. 4

Adapun saat HAM dilanggar, maka kondisi ini akan menimbulkan sebuah pergerakan di dalam masyarakat sebagai sebuah reaksi dari aksi pelanggaran tersebut. Munculnya pergerakan ini juga tentunya didorong oleh dasar pemikiran yang kuat dan terintegritas pula. Untuk menjelaskan fenomena seperti ini, maka dibutuhkan pula beberapa konsep yang memadai. Konsep-konsep tersebut ialah aktivisme dan gerakan sosial.

Secara luas, aktivisme adalah sekumpulan tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk membawa perubahan sosial ataupun politik. Aksi ini bermaksud untuk mendukung, atau menentang, satu sisi argumen yang kontroversial. Hal ini berperan sebagai sebuah ide dasar bahwa aktivisme menyediakan peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam aksi-aksinya.<sup>50</sup> Selain itu, Anjali Appadurai secara lebih konkrit mengatakan bahwa aktivisme merupakan sebuah praktik menangani suatu masalah dengan cara menantang orang-orang yang mempunyai kekuasaan di dalamnya.<sup>51</sup> Coombs dan Holladay turut mengatakan bahwa aktivisme juga dapat dilihat sebagai sebuah bentuk proses hubungan masyarakat yang modern.<sup>52</sup> Hal ini berarti saat orang-orang melakukan aktivisme, maka mereka turut melakukan proses hubungan masyarakat agar mereka dapat meraih target sasaran (domestik, internasional, dll.) yang diinginkan. Proses aktivisme ini lah yang membuka jalur relasi antara kelompok satu

---

<sup>50</sup> Marc Brenman and Thomas W. Sanchez, "Social Activism," *Encyclopedia of Quality of Life and Well-Being Research*, 2014. Hlm. 6012

<sup>51</sup> Anjali Appadurai, "What Is Activism? Anjali Appadurai at TEDxYouth@Biddeford," TEDxYouth, 25 Mei, 2013, <https://www.youtube.com/watch?v=zDVA7r7r0d0>.

<sup>52</sup> W Timothy Coombs and Sherry J Holladay, *It's Not Just PR: Public Relations in Society* (Chichester, West Sussex, U.K.: Wiley-Blackwell, 2014), hlm. 63

dengan yang lainnya untuk menjalankan agenda mereka. Hal ini lah yang menjadi dasar kuat masyarakat untuk bersama-sama melakukan gerakan sosial sebagai sebuah reaksi atas pelanggaran HAM.

Pertama-tama, perlu diketahui bahwa gerakan berbeda dengan gerakan sosial. Gerakan akan berubah menjadi gerakan sosial saat massa masyarakat yang lebih besar bergabung untuk mencapai tujuannya dan membangun keberlangsungan yang lebih panjang lagi.<sup>53</sup> Gerakan sosial sendiri merupakan sebuah kolektivitas manusia yang bergerak dalam suatu keberlangsungan untuk mempromosikan ataupun menolak suatu perubahan di dalam masyarakat. Turner dan Killian mengatakan bahwa makna ‘kolektivitas’ di sini berarti orang-orang yang bergerak di dalamnya mempunyai hubungan saling terkait dan menyatukan, bukan hanya sekumpulan orang yang bertindak terpisah namun masih ada di dalam satu ranah yang sama. Selain itu, mereka juga mengatakan bahwa gerakan sosial tidak mempunyai jumlah anggota yang tetap dan pastinya akan terus berubah.<sup>54</sup> Aspek lainnya yang menjadi esensial yaitu keberlanjutan. Gerakan sosial harus mempunyai sebuah aspek keberlanjutan atas segala aktivitas yang dilakukan. Kontinuitas juga harus ditemukan di dalam identitas gerakan tersebut agar dapat dilihat terus menerus secara historis.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> Derrick Feldman, “Social Movements for Good: What They Are and How to Lead Them,” *Philanthropy Impact* (Philanthropy Impact), diakses 8 Oktober, 2022, <https://www.philanthropy-impact.org/expert-opinion/social-movements-good-what-they-are-and-how-lead-them>.

<sup>54</sup> Ralph H Turner dan Lewis M Killian, *Collective Behavior* (Englewood Cliffs (N.J.): Prentice-Hall, Cop, 1987), hlm. 223

<sup>55</sup> *Ibid.*

Tentunya sebuah gerakan sosial juga harus mempunyai cikal bakalnya saat pertama kali mereka ingin bergerak. Snow dan Soule yang menggunakan sudut pandang *political opportunity* mengatakan bahwa gerakan sosial akan lebih mungkin untuk bangkit dan berhasil saat ada peluang di dalam ruang politik yang memperbolehkan mereka untuk berada dan berkembang. Peluang ini tidak hanya berbentuk kondisi yang baik saja, namun juga kondisi yang kurang baik.<sup>56</sup> Secara lebih spesifik, Mario Diani memetakan beberapa pendukung dinamika gerakan sosial ke dalam 4 (empat) kelompok. Kelompok-kelompok tersebut ialah: jaringan interaksi informal, keyakinan dan solidaritas bersama, aksi kolektif dalam isu konfliktual, dan juga aksi-aksi yang kebanyakan dilakukan di luar ranah institusional serta rutin dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>57</sup>

Lebih dalam mengenai keempat aspek tersebut, gerakan sosial dipercaya dapat berjalan menjadi lebih dinamis karena adanya berbagai interaksi informal yang dilakukan oleh para anggotanya. Walaupun bersifat informal, namun jaringan relasi ini mempunyai keberadaan yang kuat sebagai penggerak mobilisasi dari gerakan sosial itu sendiri. Selanjutnya, keyakinan dan solidaritas bersama menjadi sebuah identitas kolektif dari gerakan sosial tersebut yang akan membangun solidaritas serta *sense of belonging* di antara para anggotanya. Aspek yang ketiga yaitu aksi kolektif dalam isu konfliktual menekankan hadirnya sebuah isu sebagai sebuah lawan dari gerakan sosial

---

<sup>56</sup> University Of Minnesota Libraries Publishing, *Sociology: Understanding and Changing the Social World* (University Of Minnesota Libraries Publishing, 2016), <https://open.lib.umn.edu/sociology/>.

<sup>57</sup> Mario Diani, "The Concept of Social Movement," *The Sociological Review* 40, no. 1 (Februari, 1992): 1–25, <https://doi.org/10.1111/j.1467-954x.1992.tb02943.x>, hlm. 7

itu sendiri. Hal ini membuat gerakan sosial seringkali berkaitan erat dengan adanya isu sosial di berbagai bidang. Aspek yang terakhir membahas pula bahwa sebenarnya gerakan sosial tidak hanya mengacu pada pergerakan yang diciptakan oleh institusi-institusi tertentu. Adanya berbagai aksi rutin di dalam kehidupan sehari-hari saja sudah dapat memunculkan semangat bagi orang-orang untuk bergerak bersama.

Dinamika gerakan sosial yang didukung oleh aspek-aspek tersebut tentunya akan menciptakan karakteristik tertentu. Adapun beberapa karakteristik gerakan sosial paling utama yang disetujui oleh para ahli yaitu *collective action* dan juga *oriented towards social change*. Karakteristik yang pertama kembali mereiterasikan adanya aksi dari sebuah kolektivitas manusia yang berkelanjutan. Sementara itu, karakteristik yang kedua menekankan bahwa gerakan sosial berorientasi untuk membawa perubahan sosial di masyarakat, entah itu parsial, total, pada norma, ide, nilai, dll.<sup>58</sup>

Berangkat dari gerakan sosial itu sendiri, ada sebuah kelompok yang sebenarnya sudah muncul di akhir tahun 1950-an saat Perang Dunia II terjadi. Kelompok ini mulai menjadi suatu hal yang umum di kalangan masyarakat pada tahun 1960-an dan semakin populer di abad ke-21 ini.<sup>59</sup> Kelompok yang dimaksud ialah youth-led movement atau gerakan sosial yang dipimpin oleh kaum muda merupakan sebuah pergerakan yang dijalankan oleh kaum muda yang berorientasi pada perubahan sosial.<sup>60</sup> *Youth-led*

---

<sup>58</sup> Ajay Kumar Yadav, "Social Movements, Social Problems and Social Change," *Academic Voices: A Multidisciplinary Journal* 5, no. 1 (30 September, 2016): 1–4, <https://doi.org/10.3126/av.v5i0.15842>, hlm. 2

<sup>59</sup>J. Reulecke, "Youth Movements, History Of," *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences*, 2001, 16671–74, <https://doi.org/10.1016/b0-08-043076-7/02730-3>, hlm. 16672

<sup>60</sup> ScienceDirect, "Youth Movements," *sciencedirect* (ScienceDirect), diakses 9 Oktober 2022, <https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/youth-movements>.

*movement* pertama-tama mulai muncul akibat perbuatan para pemerintah yang tidak dapat memenuhi HAM masyarakatnya. Survei yang diadakan oleh One Young World mengatakan bahwa 80% (delapan puluh persen) dari responden mereka sudah pernah mengalami pelanggaran HAM secara langsung oleh pemerintah. Hal inilah yang kemudian semakin mendorong kaum muda masa kini untuk bergerak bersama di bawah payung *youth-led movement*.<sup>61</sup>

Dalam pergerakannya, *youth-led movement* mengimplementasikan ide aktivisme yang dianutnya untuk membawa perubahan sosial ataupun politik yang sesuai dengan agenda dan motif mereka secara lebih konkrit. Ada beberapa bentuk aktivisme yang dapat dilakukan oleh *youth-led movement*, seperti: demonstrasi dan protes, boikot, pemogokan, penulisan surat, serta kampanye media sosial.<sup>62</sup> Tentunya tidak semua proses aktivisme melakukan kelima hal tersebut. Proses aktivisme akan selalu disesuaikan oleh apa yang dibutuhkan oleh para pelakunya. Saat menjalankan bentuk-bentuk aktivisme tersebut, *youth-led movement*, sebagai sebuah bentuk gerakan sosial, juga harus mengemban beberapa peran, yaitu sebagai: warga negara, pembaharu (*reformer*), pemberontak, dan juga agen perubahan.<sup>63</sup> Dari sini, dapat dilihat keterkaitan antara aktivisme dan *youth-led movement* yang saling memengaruhi dalam aksi konkritnya di dalam masyarakat.

---

<sup>61</sup> One Young World, "If Governments Don't Uphold Human Rights What Can We Do?," oneyoungworld (One Young World), diakses 9 Oktober 2022, <https://www.oneyoungworld.com/news-item/if-governments-don-t-uphold-human-rights-what-can-we-do>.

<sup>62</sup> Human Rights Careers, "5 Types of Activism," Human Rights Careers (Human Rights Careers), diakses 20 Oktober 2022, <https://www.humanrightscareers.com/issues/types-of-activism/>.

<sup>63</sup> Bill Moyer, "The Four Roles of Social Activism," The Commons (The Commons Social Library), diakses 20 Oktober 2022, <https://commonslibrary.org/the-four-roles-of-social-activism/>.

Di dalam penelitian ini, paparan mengenai HAM sebagai konstruksi sosial, aspek-aspek gerakan sosial, pendukung dinamika gerakan sosial, serta karakteristik gerakan sosial dijelaskan pada Bab 2. Sementara itu, bentuk-bentuk aktivisme yang dilakukan secara konkrit serta peran-peran yang diemban oleh *youth-led movement* dijelaskan pada Bab 3.

## **1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data**

### **1.6.1 Metode Penelitian**

Penelitian ini dikaji secara kualitatif. Metode kualitatif digunakan dengan cara melakukan studi pustaka dari dokumen-dokumen, laporan, serta teks lainnya yang ada. Selain itu, dengan metode kualitatif, isu akan dipaparkan lewat gambar dan data visual lainnya. Dari berbagai sumber ini, analisis dan interpretasi dilakukan agar kemudian hasil dari proses tersebut dapat menjadi sebuah paparan pemahaman dari topik dan pertanyaan penelitian pada tulisan kali ini.<sup>64</sup>

### **1.6.2 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah dengan studi literatur dari sumber-sumber data primer dan sekunder. Adapun data primer berfokus pada laporan-laporan tahunan mengenai kondisi HAM di Thailand dari kementerian Thailand sendiri serta buku-buku teoretis yang membantu menjelaskan

---

<sup>64</sup> John W Creswell, *Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 3rd ed. (Los Angeles: Sage, 2009), hlm. 254

fenomena yang dikaji. Selain itu, data sekunder banyak berpacu pada jurnal akademik, publikasi digital, berita *online*, maupun sumber-sumber lainnya yang berasal dari internet atau berbentuk digital namun masih bersifat relevan.<sup>65</sup>

## **1.7 Sistematika Pembahasan**

Untuk menjelaskan *youth-led movement* Thailand terkait pelanggaran HAM pada masa kepemimpinan Prayut, maka penelitian ini dilakukan secara sistematis dan dituangkan ke dalam 5 (lima) bab. Bab 1 (satu) memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian literatur, metode penelitian, teknik pengumpulan data, serta sistematika pembahasan. Bab 2 (dua) berbicara tentang pelanggaran HAM yang dilakukan oleh rezim Prayut. Bab ini akan dimulai dengan pembahasan awal mula kepemimpinan dan rezim Prayut Chan-ocha sebagai seorang PM Thailand serta apa saja kebijakan-kebijakannya maupun perilakunya yang telah melanggar HAM bagi masyarakat Thailand.

Bab 3 (tiga) kemudian membahas tentang cikal bakal terciptanya sebuah gerakan sosial di Thailand. Bab ini dimulai dengan pembahasan sejarah dan ide-ide utama terbentuknya gerakan sosial yang kemudian akan berfokus pada lahirnya *youth-led movement* Thailand. Bab 4 (empat) membahas tentang implementasi *youth-led movement* Thailand terkait segala pelanggaran HAM yang ada pada masa

---

<sup>65</sup> Firdaus and Fakhry Zamzam, *Aplikasi Metodologi Penelitian* (Deepublish, 2018). hlm. 102



kepemimpinan Prayut, serta hubungannya dengan pendekatan dan konsep yang sudah ada. Sebagai penutup, bab 5 (lima) memaparkan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis.